

BAB V

PENUTUP

1.1. Simpulan

1. Akuntabilitas manfaat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota sebagai berikut: (a) sosialisasi program pengelolaan dana desa telah dilaksanakan, sehingga informasi program pengelolaan dana desa dapat tersampaikan kepada masyarakat desa; (b) pemahaman program pengelolaan dana desa belum mencakup keseluruhan masyarakat desa; (c) ketepatan program pengelolaan dana desa sudah tepat dengan sasaran pengelolaan dana desa yang sudah ditentukan dalam perencanaan. Namun demikian, sebagian masyarakat yang menjadi kelompok sasaran yang dialokasikan dari dana desa tidak memanfaatkan secara optimal program pemberdayaan yang ada di desa; (d) pencapaian tujuan pengelolaan dana desa terwujud melalui kesesuaian antara hasil pelaksanaan program pengelolaan dana desa dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. (e) program pengelolaan dana desa memberikan dampak perubahan nyata atau manfaat bagi masyarakat desa.
2. Faktor yang menghambat terwujudnya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota adalah partisipasi masyarakat yang rendah dan masih kurang dalam segenap proses pembangunan desa. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong terwujudnya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota adalah (1) kepemimpinan Kepala Desa Sansarino

Kecamatan Ampana Kota mampu dalam berkomunikasi mempengaruhi staf, masyarakat dan *stakeholders* lainnya untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dana desa, dan (2) pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dilakukan baik oleh Pemerintah Desa Sansarino, Pemerintah Kecamatan Ampana Kota, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan juga masyarakat agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Saran

1. Memperhatikan mayoritas masyarakat belum memahami berbagai kegiatan dalam pengelolaan dana desa dan kewajiban mereka sebagai pengelola langsung dari pengelolaan dana desa tersebut dan sebagian masyarakat yang menjadi kelompok sasaran yang dialokasikan dari dana desa tidak memanfaatkan secara optimal program pemberdayaan di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota, maka Pemerintah Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota perlu menggalakkan kegiatan sosialisasi pengelolaan dana desa secara intensif dalam berbagai kegiatan baik formal maupun non formal.
2. Memperhatikan partisipasi masyarakat yang rendah dan masih kurang dalam segenap proses pembangunan desa, maka diperlukan berbagai teknik pendekatan personal dari Pemerintah Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota untuk menggugah masyarakat, sehingga terdorong untuk meningkatkan partisipasinya dalam pengelolaan dana desa.
3. Kepala Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota perlu meningkatkan kemampuan kepemimpinannya dengan mengadaptasi kombinasi model

kepemimpinan yang memperkuat kerjasama dan partisipasi aktif dari masyarakat.

4. Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dilakukan baik oleh Pemerintah Desa Sansarino, Pemerintah Kecamatan Ampana Kota, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Unaperlu ditingkatkan antara lain melalui kelompok pengawas internal dan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah. Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Adrianto, N. (2007). *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Palangkaraya: Bayu Media.
- Akadun. (2009). *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2017). *Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Handoko, H. (2006). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian, Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Jones, P. (2003). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN dan BPKP RI.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. (2007). *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN dan BPKP RI.

- Manullang, M. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- McQuail, D. (2005). *Teori Komunikasi Massa McQuail*. Jakarta: Salemba Humanika
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rosjidi. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standar dan Metode*. Surabaya: Aksara Satu.
- Siagian, S.P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soemantri, B.T. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta: Alfabeta.
- Ulum, I. M.D. (2004). *Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar*. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Waluyo, A. (2007). *Manajemen Publik. Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal dan Proceeding:

- Agustin, M. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Publika*, 4(1).
- Akib, H. & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Kebijakan Publik*. Jakarta. *academia.edu*.
- Arifiyanto, D.F. & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3).
- Atmadi, G., & Widati, S. R. W. (2015). Strategi pemilihan media komunikasi LPPOM MUI dalam sosialisasi & promosi produk halal di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(2), 87-97.
- Budiani, N.W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Vol. 2*(1), 49-57.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 1269-1298.
- Dewi, N. M. P, & Rahaju, T. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 6(6), 1-7.
- Fajri, R., Setyowati, E., Siswidiyanto. (2017). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan,

- Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3 (7), 1099-1104.
- Fathoni, M. (2015). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 139-146.
- Hadiyati, S.N. (2018). Studi Identifikasi Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa Di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon). *Jurnal MONEX* 7(2), 435-442.
- Halimah, M., & IP, S. (2018). Konsep dan Ruang Lingkup Administrasi Perkantoran. Diakses dari [http://repository. ut. ac. id/3972/1/ADPU4331-M1. Pdf](http://repository.ut.ac.id/3972/1/ADPU4331-M1.Pdf) pada 30 Juni 2020.
- Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), 39-46.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*. 2 (1), 16-30.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1, 13-26.
- Irawati, D. (2009). Implementasi Nilai-Nilai Budaya Organisasi Melalui Sosialisasi Budaya Organisasi. *SEGMEN Jurnal Manajemen dan Bisnis*, (2), 1-12.

- Jannah, S. F., & Niswah, F. (2016). Efektivitas Program Siaran Radio Suara Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang). *Jurnal Publika* 4(3), 1-8.
- Jibril, A. (2017). Efektivitas program perpuseru di perpustakaan umum Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Universitas Airlangga*, 6(2), 1-8.
- Juliansyah, D. 2013. Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*. 1(2), 822-834.
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Ekonomika-Bisnis* 7(2), 143-152.
- Kusmana, D., & Ismail, I. (2018). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa. *Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah*, 81-100.
- Lamangida, T., Akbar, M. F., & Hasan, H. (2017). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(1), 68-78.
- Lizard, R. S., Kimbal, M., & Lopian, M. (2017). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(1).

- Maulida, A. D. N. (2014). Studi Tentang Efektifitas dalam Sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 140-154
- Misno, U. M. A. (2016). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat). *PERSPEKTIF*, 5(2).
- Mualifu, Guspul A., Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering* 1(1), 49-59.
- Mulyana, D. (2015). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Dendun Kabupaten Bintan Tahun 2011-2013. <http://jurnal.umrah.ac.id/>
- Mustanir, A. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 4(2).
- Nasar, M. (2016). Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pengembangan Ekonomi di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 4(12).
- Naufan, F. D. (2018). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Padas, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(01), 241-250.

- Pakpahan, R. V. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Parlombuan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7598>
- Pertiwi, M., & Nurcahyanto, H. (2017). Efektivitas Program Bpjs Kesehatan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Pasien Pengguna Jasa Bpjs Kesehatan Di Puskesmas Srandol). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 416-430.
- Ridwan, S.B dan Adda, H.W. (2017). “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tojo Una-Una” *eJurnal Katalogis* Vol. 5 No. 9 September: 139-144.
- Rosalinda. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segoderejo Dan Desa Kerap Kecamatan Sumobito) Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Royat, S. (2007). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan. In *Materi Assisten Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Seminar Nasional: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian Dalam Penanggulangan Kemiskinan, tanggal* (Vol. 21)
- Sanusi, P. & Djumlani, A. (2014). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. *E-Journal Administrative Reform* 2 (3). 1732-1745.

- Sapri, S., Mustanir, A., Ibrahim, M., Adnan, A. A., & Wirfandi, W. (2019). Peranan Camat Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 33-48.
- Setiawan, A., Haboddin, M., Wilujeng, N.F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2 (1), 1-16.
- Syamsi, S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1).
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1).
- Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 18-32.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471-481.
- Utari, A.S. (2018). Tata Kelola Alokasi Dana Desa yang Tepat Sasaran untuk Kepentingan Pembangunan Masyarakat.
<https://www.kompasiana.com/ayuningtyassuciani/5692b102b47a61cc0dfb>

[bf9d/tata-kelola-alokasi-dana-desa-yang-tepat-sasaran-untuk-kepentingan-pembangunan-masyarakat?page=2](#)

Wibisono, N. (2017). Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap dana desa di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(2), 8-19.

Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148-152.

Yasa, I. M. (2008). Penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat di Provinsi Bali. *Input: Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 1(2).

Undang-Undang dan peraturan lainnya:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia 5 Tahun 2015.

Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana
Desa

Dokumen lainnya:

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pemerintah Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Tahun 2017.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pemerintah Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Tahun 2018.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pemerintah Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Tahun 2019.